

EFEKTIVITAS PROGRAM G-ONLINE DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP

(Studi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep)

Oleh :

Aliffikri Nasrullah¹⁾, Irma Irawati Puspaningrum²⁾, Alqaf Harto Maryono¹⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik
Universitas Wiraraja Madura
E-mail : fikrialif2526@gmail.com¹⁾, irma@wiraraja.ac.id²⁾,

Abstract

The Government Online (G-Online) program that has been implemented to start its e-government system in the form of public service using the use of Information Technology (IT) systems has made it easier for OPDs in the scope of government, where at this time Sumenep Regency is part of the Movement Towards 100 Smart City Indonesia organized by the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The initiation of smart city implementation in Sumenep Regency is also based on the needs of the local government in realizing integrated and efficient public services that have been preceded by the implementation of e-government. This research method uses descriptive qualitative research focusing on four aspects of effectiveness, namely 1) Aspects of tasks or functions, 2) Aspects of plans or programs, 3) Aspects of provisions and regulations, 4) Aspects of goals or ideal conditions. The results show that the effectiveness of the G-Online program has a big influence on the Smart City concept developed in Sumenep Regency because in the Smart City itself the use of Information Technology (IT) systems is fundamental in its implementation, therefore the G-Online program continues to be developed so that can grow good and efficient results in realizing Smart City in Sumenep Regency.

Keywords: Effectiveness, G-Online Program, Smart City

Abstrak

Program Government Online (G-Online) yang telah diterapkan untuk mengawali sistem e-governmentnya berupa pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan sistem Informasi Teknologi (IT) telah memberi kemudahan bagi para OPD di lingkup pemerintahan, dimana pada saat ini Kabupaten Sumenep menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia yang di selenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Inisiasi pelaksanaan smart city pada Kabupaten Sumenep juga dilandasi oleh kebutuhan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan efisien yang telah didahului dengan penyelenggaraan e-government. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian empat aspek efektivitas, yaitu 1) Aspek tugas atau fungsi, 2) Aspek rencana atau program, 3) Aspek ketentuan dan peraturan, 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program G-Online berpengaruh besar dalam konsep Smart City yang di kembangkan di Kabupaten Sumenep sebab dalam Smart City sendiri penggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) adalah hal yang mendasar dalam penerapannya, oleh sebab itu program G-Online terus dikembangkan agar dapat menumbuhkan hasil baik dan efisien dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Efektivitas, Program G-Online, Smart City

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini teknologi diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia untuk

menunjukkan peranannya. Karena pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan,

pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok untuk diterapkan disini adalah teknologi informasi. Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (E-Government).

Inovasi e-government adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem egovernment, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah. Dengan hal ini pemerintah memberikan terobosan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakatnya melalui E-Government ini.

Menurut Inpres Nomor 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional tentang EGovernment memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan menurut tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing agar terciptanya program pengembangan E-Government, dengan begini diharapkan semua yang bersangkutan dengan pemerintahan dapat diakses secara transparansi atau terbuka oleh masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang

kerap terjadi dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (goodnewsfromindonesia.id)

Pemerintah Kabupaten Sumenep merintis awal sistem E-Governmentnya melalui program G-Online yaitu Government Online yang diawali di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) hingga berkembang di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini secara sistematis mengatur tahap pengembangan teknis dan juga infrastruktur seperti halnya mengintegrasikan jaringan antar OPD baik internet maupun intranet yang tujuannya tidak lain agar mempermudah akses transaksi data antar OPD secara cepat dan juga efisien tentunya.

Program G-Online dirintis sejak tahun 2002, pada awal pelaksanaannya GOnline menitik beratkan pada pengembangan teknis dan infrastuktur di Lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep saja yang diproyeksikan ke pengelola website Pemerintah Kabupaten Sumenep. Selanjutnya setelah pembangunan website rampung pada tahun 2005 maka program dilanjutkan dengan pengembangan integrasi jaringan di masing-masing OPD, hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dalam satu data base, sekaligus pembangunan situs sub domain dari situs Pemkab Sumenep dimana sub situs

subdomain tersebut merupakan situs OPD di lingkungan Pemkab Kabupaten Sumenep. Pengembangan G-Online digunakan untuk memenuhi pelaksanaan tugas di lingkungan Pemkab Sumenep, kebutuhan tersebut untuk mempermudah kinerja OPD pada waktu akan melakukan input data serta promosi program. *kabarmadura.id*

Program G-Online ini juga memudahkan masyarakat menerima dan mengetahui informasi di dalam lingkup pemerintahan secara transparansi dan valid. Sebab pemerintah Kabupaten Sumenep mengedepankan keterbukaan kepada masyarakat dalam kegiatan birokrasinya. Pada tahun 2020, Diskominfo mengalokasikan dana penyediaan jaringan G- Online yang awalnya 2,4 miliar, namun karena pandemi covid-19 yang melanda dipangkas menjadi 1,5 miliar untuk memaksimalkan kinerja OPD, yang mana anggaran tersebut dibayarkan kepada Telkom, sebagai penyedia jaringan, secara bertahap. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persediaan Diskominfo Sumenep.

Seiring berjalannya waktu di tahun 2014, Kabupaten Sumenep mencanangkan Sumenep Go Smart City yang merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya.

Smart city sendiri sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut yang mana diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Sumenep membuat buku Masterplan Smart City yang berisikan bab satu sampai tiga, masterplan smart city ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inovasi program dan kegiatan beserta peta jalan pelaksanaan mulai tahun 2019 sampai 2028. Inisiatif smart city dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di Kabupaten Sumenep. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah merancang penunjang berupa website kabupaten, yang mana ini adalah planing keberlanjutan dari program G-Online sebelumnya yang telah dijalankan dan juga terintegrasi antar OPD untuk menyajikan informasi kependudukan, ketenagakerjaan, sistem informasi perizinan, pendidikan, jaring pengaman sosial, informasi kesehatan, pelaporan masyarakat, pajak daerah, e-procurement, dan e-surat. Selain itu, kerjasama dengan provider juga dilakukan untuk menunjang jaringan internet

hingga kepulauan.

Secara prinsip, Kabupaten Sumenep telah melakukan pengembangan smart city secara bertahap, khususnya di sektor pemerintahan atau dikenal dengan program g-online. Tahapan-tahapan yang dilakukan diantaranya adalah e-budgeting dan presensi online. Hal tersebut tidak terlepas dari yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025, dimana ujungnya ialah pelayanan publik yang terbaik, efisien, dan efektif kepada masyarakat.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekatisasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Muhidin (2009) yang menjelaskan bahwa Efektifitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pelanggan.

Terdapat beberapa aspek untuk melihat efektivitas sebuah program. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muasaroh, (2010), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat di jelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek

antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pelayanan akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pelayanan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau programdikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pelayanan, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari kepuasan pengguna.

Selain aspek diatas, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas kerja suatu organisasi yang memberikan pelayanan

yaitu :

1. Waktu Cepat tidaknya satuan kerja dalam suatu organisasi memberikan pelayanan kepada pelanggannya jelas merupakan suatu kriteria. Hanya saja penggunaan ukuran tentang cepat tidaknya pelayanan itu diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Artinya, seorang mungkin saja merasa ditinjau dari segi waktu, pelayanan yang di terimanya sudah memuaskan, sedangkan bagi orang lain waktu yang sama mungkin masih dirasakan terlalu lama. Terlepas dari penilaian subjektif, yang jelas ialah bahwa faktor waktu dapat di jadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas dan efesiensi kerja organisasi.
2. Kecermatan dapat di jadikan ukuran. Dalam hal ini yang di maksud ialah misalnya jika menurut pengalaman pelanggan yang di terimanya kurang dari yang seharusnya, maka ia akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi terhadap afesiensi dan efektivitas kerja dari pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepadanya meskipun di berikan dalam waktu singkat.
3. Gaya pemberian layanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efesiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Yang di maksud dengan

gaya disini adalah cara dan kebiasaan para wartawan dalam suatu organisasi memberikan jasa kepada pelanggannya. Tidak mustahil bahwa seorang pendatang baru disuatu tempat menerima pelayanan oleh suatu organisasi tertentu merasa bahwa gaya pelayanan dari pihak yang memberikan pelayanan

E-Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2010:113), EGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Sedangkan dalam buku E- Government In Action (2015:5) menguraikan E-Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- 1) Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya.

- 2) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparansi.
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- 4) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis, karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana E-Government tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pengembangan E-Government berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi E- government.

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju E-Government, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri.
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

- c) Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi.
- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.
- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi.
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak- pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, tuntutan perubahan no 18 Strtegi 6 melaksanakan Pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidak pastian, oleh karena itu pengembangan EGovernment perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti semua pihak.

Smart City

Smart City (Kota Pintar) adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi

pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Menurut (Supangkat, 2015) *Smart city* adalah peningkatan dan penataan kota dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mengerti, pemahaman, serta pengendalian dari pelbagai sumber daya dari suatu kota secara efektif dan juga efisien. Hal ini diharapkan agar pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang terus menerus dalam dimaksimalkan.

Suatu kota dapat dianggap “*smart*” dengan dilakukan tinjauan terhadap definisi, komponen serta langkah –langkah kinerja kota. Deskripsi dari “*smart city*” termasuk didalamnya adalah kualitas dari masyarakat dan komunitas dalam melibatkan teknologi. Banyak elemen dan dimensi yang menjadi karakteristik “*smart city*” (Albino, et al., 2015).

Smart city terdiri atas 6 dimensi yang menjadi bagian dari konsep kota cerdas (Cohen, 2012), yaitu:

- 1) *Smart Government*
(Pemerintahan Cerdas)
- 2) *Smart Environment*
(Lingkungan Cerdas)
- 3) *Smart People* (Masyarakat Cerdas)
- 4) *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)
- 5) *Smart Living* (Kehidupan Cerdas)
- 6) *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Pada intinya, konsep *Smart City* adalah bagaimana cara menghubungkan

infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni (Muliarto, 2015)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk kata atau kalimat serta gambar yang kemudian akan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2016:9) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan melalui sebuah penelitian. Dimana fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Muasaroh, (2010), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pelayanan akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pelayanan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pelayanan, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari kepuasan pengguna.

Subjek penelitian dalam metode kualitatif adalah informan atau orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dan fokus penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Informan Kunci, yaitu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Dinas Komunikasi Kabupaten Sumenep.

- 2) Informan Utama, yaitu Pemegang Website Kominfo Kabupaten Sumenep (Bidang Pusat Data Elektronik).
- 3) Informan Pendukung, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik analisa data untuk untuk menata serta mencari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan yang lainnya yang kemudian dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sugiyono (2018: 245), menyebutkan langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi Tahap reduksi data, Tahap penyajian data, dan Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan baik yang dihasilkan dari pengamatan langsung (observasi) maupun dari hasil wawancara serta temuan lainnya yang berasal dari dokumentasi

dilokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan fokus penelitian dengan judul Efektivitas Program G-Online Dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumenep. Terkait dengan fokus penelitian yang mengacu pada empat aspek berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), yaitu aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, aspek tujuan atau kondisi ideal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan teknik wawancara, kemudian peneliti juga menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung untuk menggali data dan situasi kondisi yang terjadi pada obyek penelitian serta menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian dilapangan. Berdasarkan hasil penelitain dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis paparkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di disimpulkan bahwa program penyediaan jaringan G-Online dalam mewujudkan Smart City dapat dikatan efektif dan memenuhi aspek-aspek efektifitas menurut Muasaroh (2010:13) yaitu aspek tugas atau fungsi, rencana terprogram, peraturan dan ketentuan, tujuan kondisi ideal. Yang mana akan dijelaskan hasil penelitian Efektifitas Program G-Online dalam

Mewujudkan Smart City di Kabupaten sumenep dengan empat aspek:

1) Aspek tugas atau Fungsi

Suatu organisasi publik tidak akan dapat berjalan jika tidak mempunyai tugas ataupun fungsi dalam menuju tujuannya, tugas dan fungsi ialah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Oleh sebab itu perlunya tugas ataupun fungsi disini sangatlah penting untuk keberhasilan suatu organisasi publik. Seperti pada program G- Online yang dibuat untuk menunjang ataupun merintis awal sistem E-Governmentnya di Kabupaten Sumenep.

Pada awal pelaksanaannya G-Online menitik beratkan pada pengembangan teknis dan infrastuktur di Lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep saja diproyeksikan pengelola website Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pembuatan program G-Online merupakan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk mendorong pemakaian Teknologi Informasi dalam pelayanan publik yang tidak lain untuk mendukung mekanisme sistem pekerjaan di lingkup pemerintahan khususnya para OPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika tergolong Tipe A, menjalankan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

terkait tugas dan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Diskominfo Kabupaten Sumenep membagi bidang menjadi lima dalam menjalankan peraturan menteri tersebut, yaitu Sekretariat, Komunikasi Publik, Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Persandian, serta Statistik dan Pemberdayaan TIK. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelenggaraan GCIO (Government Chief Information Officer, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep membentuk unit pelaksana teknis (UPT) Media Center yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Diskominfo. UPT Media Center memiliki tugas dalam penyebarluasan informasi terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui media cetak, elektronik dan online.

Sebagai daerah yang terpilih dalam Gerakan 100 Smart City, dinas komunikasi dan informatika memiliki fungsi mengelola penyelenggaraan ekosistem smart city sesuai Permen Kominfo 14/2016. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep telah menjalankan fungsi tersebut dengan membentuk 2 dari 3 lembaga/perangkat pendukung smart city yaitu Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muasaroh (2010:13) Aspek tugas atau fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pelayanan akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena tugas atau fungsi merepukan aspek penting dalam menentukan jalannya suatu organisasi ke arah yang lebih baik dengan memaksimalkan tugas atau fungsi dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang sejatinya sebagai sistem dari pelayanan publik dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dan modern patutlah organisasi publik terus mengembangkan ataupun memajukan kinerjanya untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

2) Aspek Rencana Terprogram

Pada aspek rencana masih ada kaitannya dengan aspek sebelumnya yang mana aspek ini berbicara tentang rencana suatu organisasi yang telah terprogram dan dilanjutkan dengan pembagian tugas maupun fungsi dalam organisasi tersebut. Aspek rencana memiliki arti penting dalam berjalannya organisasi, dalam hal ini pembuatan rencana terdahulu dapat mengetahui kapan dan kemana suatu program akan tertuju dan lebih mencegah adanya permasalahan yang kerap terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Muasaroh (2010:13) Aspek rencana atau program, yang

dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pelayanan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

Jaringan yang terintegrasi, memungkinkan transaksi data antar OPD dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga penyediaan informasi dan proses Desiminasi Informasi bagi masyarakat dapat dilakukan secara online melalui Situs Kabupaten Sumenep dan sekarang penilaian dari program ini sendiri sudah menjadi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilakukan 2 tahun sekali.

Rencana awal dari pihak Diskominfo sendiri menyediakan jaringan G-Online ini tidak lain untuk mendukung mekanisme kerja pemerintahan dengan pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih., dengan hal itu penerapan sistem E-Government di Kabupaten Sumenep bisa dibilang terlaksana, dimana pada awal perintisan program G-Online setiap OPD terkoneksi hanya menggunakan radio 2,4 namun sejak pada tahun 2017 lalu telah menggunakan jaringan mandiri yaitu Fiber Optik (FO) disetiap OPD. Bukan hanya itu saja Diskominfo Kabupaten Sumenep telah merencanakan dan akan direalisasikan pada waktu dekat ini tentang pembuatan aplikasi-aplikasi dalam penerapan konsep Smart City yang tidak luput dari peran

jaringan G-Online yang memadai untuk pengoperasiannya dan melakukan kerja sama dengan OPD yang ada di Kabupaten Sumenep guna menyukkseskan visi dan misi Kabupaten Sumenep.

Pada rencana pengoperasiannya tidak luput dari perhitungan volume, skala, jaringan dan juga petanya, dan penambahan bandwidth sekitar 2 giga, pada saat ini Kabupaten Sumenep telah masuk ke dalam 100 Smart City yaitu adalah tujuan selanjutnya dan tinggal penambahan-penambahan program yang menunjang. Bekerja sama dengan para OPD menciptakan suatu aplikasi yang didukung oleh jaringan yang memadai dapat membantu terwujudnya pelayanan publik yang aman, transparansi, dan juga efisien. Pembuatan aplikasi yang pengoperasiannya harus terkait dengan bidang OPD yang menerapkan dan merupakan tugas tersendiri bagi Diskominfo untuk menyediakan jaringan yang terintegritas antar perangkat daerah yang fokusnya tidak hanya di daratan namun di kepulauan pun harus tersedia dan merata.

Seperti halnya pada Dinas Kesehatan yang memakai aplikasi Hompimpa yang mana penggunaannya di fasilitasi oleh pihak Diskominfo, aplikasi Hompimpa ini pada umumnya mensinergikan antara puskesmas, rumah sakit, dengan rumah sakit rujukan yang lainnya namun tetap server utama dari aplikasi ini dari pihak Diskominfo.

3) Aspek Ketuntuan dan Peraturan

Aspek ketentuan dan peraturan disini berhubungan dengan validasi atau legalitas dalam berjalannya suatu rencana atau program yang akan diterapkan yaitu program penyediaan jaringan G- Online. Sejak awal kemunculannya program G- Online tidak mempunyai regulasi yang mempunyai kekuatan hukum hanya sebatas instruksi bupati yang bersifat umum dan general, namun pengawasan tetap berada di tingkat Top Manager dalam hal ini Bupati Sumenep, yang setiap 3 bulan sekali diadakan pertemuan ditingkat Pimpinan OPD untuk mengevaluasi pelaksanaan program G-Online terutama perkembangan website subdomain.

Program G-Online ini adalah langkah awal pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merintis sistem E-Governmentnya, dengan hal ini pemerintah memberikan terobosan pelayanan yang efektif dan juga efisien dalam Inpres Nomor 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional tentang E-Government. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dilandasi Perbup 52 tahun 2017 Kabupaten Sumenep dan juga pada Perbup tentang Masterplan SmartCity itu tahun 2019, sebagai pengelola dan juga *landing sector* program G-Online ini hanya dapat mematuhi dan memberikan yang terbaik terkait ketentuan dan peraturan yang ada. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan e-Government, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi dengan cepat dan akurat. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi di dalam pemerintahan dengan skala nasional (e-government) akan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, sekat-sekat birokrasi dapat diminimalisasi sehingga instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu. Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) tersebut guna menjawab keresahan masyarakat yang menuntut pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat luas yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah dijangkau, serta interaktif. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya fasilitas untuk menampung aspirasi sehingga tercipta dialog publik yang partisipatif dalam perumusan kebijakan negara. Namun, agar tidak gagap dalam menggunakan e-government, perlu adanya penyeimbang berupa literasi digital bagi sumber daya manusia nya.

Dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional” Kabupaten Sumenep telah

berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menjadikan Sumenep sebagai Kota Batik, Kota Ukir, Kota Sumekar, Kota Keris dan saat ini Kota Cerdas atau Smart City. Sebagai wujud komitmen, maka perlu dibuat Visi Smart City yang dapat menjadi arah pembangunan kedepan yaitu 2019-2028. Dengan visi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama-sama pemangku kepentingan (swasta, akademisi, tokoh agama, asosiasi, dan masyarakat) akan dipandu dalam mengelola berbagai persoalan daerah, meningkatkan tata kelola pelayanan public, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kepala daerah tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City Indonesia Gerakan Menuju 100 Smart City bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan kabupaten dan kota dengan menggunakan konsep Smart City. Pada tahap pertama, ada 25 kabupaten/kota yang menandatangani MoU dan menjadi contoh wilayah Smart City. Ke-25 wilayah ini telah melalui proses assessment yang mengukur kesiapan visi, regulasi, SDM, serta potensi di setiap daerah.

4) Aspek Tujuan Atau Kondisi Ideal

Aspek terakhir pada penelitian ini ialah aspek tujuan atau kondisi ideal, yang mana setelah melewati aspek-aspek

sebelumnya, aspek ini berkaitan dengan bagaimana dan sampai mana progress program G-Online ini telah berjalan pada saat ini. Dengan tujuan program yang ideal telah tercapai maka dengan hal itu dapat memberikan impact yang baik pada penerapannya dan juga dapat semakin tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu, dengan demikian kinerja para OPD dapat terakomodir dengan sistematis dan efektif untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan atau kondisi ideal yang sudah tercapai pada program penyediaan jaringan G-Online ialah secara prinsip, Kabupaten Sumenep telah melakukan pengembangan Smart City secara bertahap, khususnya di sektor pemerintahan dengan program G-Online. Tahap-tahapan yang dilakukan diantaranya adalah e-budgeting dan presensi online. Hal tersebut tidak terlepas dari yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025, dimana ujungnya ialah pelayanan publik yang terbaik, efisien, dan efektif kepada masyarakat. Upaya menuju Smart City, Pemkab telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Diantaranya kegiatan bimbingan teknis manajemen resiko terhadap 6 pilar Smart City.

Berdasarkan realisasi program kegiatan tersebut dengan enam pilar, pada tahun 2019 dari 30 kegiatan terealisasi 23 kegiatan dengan rata-rata target terpenuhi

77%, sedangkan pada tahun 2020 dari 38 kegiatan terealisasi 32 kegiatan dengan rata-rata target terpenuhi 84%. Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat dikatakan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal, sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025, visi yang ingin dicapai adalah “SUMENEP YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN MAJU MANDIRI”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam enam misi, yaitu:

1. Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak,
2. Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak pada masyarakat,
3. Pengembangan fasilitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang berkualitas, murah, dan menjangkau kebutuhan masyarakat,
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa,

5. Pengembangan sistem aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan, dan memiliki akuntabilitas, serta
6. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam. Termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yang berjudul Efektifitas Program G-Online Dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumenep yang berpatokan kepada empat aspek efektifitas menurut Muasaroh (2010:13) yaitu aspek tugas, aspek rencana terprogram, aspek ketentuan dan peraturan, aspek tujuan atau kondisi ideal, yang telah dibahas oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyediaan Jaringan G-Online oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dapat dikatakan efektif dalam memberikan kemudahan kinerja kepada para OPD dan juga untuk mengembangkan Smart City di Sumenep. Maka dari ini dapat disimpulkan dengan berpatokan kepada empat aspek diatas.

Aspek tugas atau fungsi terkait adanya penyediaan program G-Online guna mendukung dan mekanisme kerja para OPD sudah terlaksana dengan baik, program G-Online ini juga berperan dalam mewujudkan

Smart City di Kabupaten Sumenep, Smart City sendiri ialah pemberdayaan teknologi informasi untuk kemajuaan daerah yang terpilih menjadi kota cerdas, dalam hal ini semua OPD ikut serta dalam mendukung Smart City.

Aspek Rencana Terprogram terkait penyediaan program G-Online di Kabupaten Sumenep mempunyai beberapa langkah dalam pengoperasiannya, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan tentunya kepada pihak yang dituju seperti para OPD agar dapat menjalankannya dengan baik dan kompeten dan hanya tinggal wujud komitmen tersendiri dari para OPD.

Aspek Ketentuan dan Peraturan, sejak awal kemunculannya program G-Online tidak mempunyai regulasi yang mempunyai kekuatan hukum namun sebatas instruksi bupati yang hanya bersifat umum dan general dalam pengawasan yang berada di tingkat Top Manager dalam hal ini Bupati Sumenep, ada pertemuan yang rutin setiap 3 bulan sekali ditingkat Pimpinan OPD untuk mengevaluasi pelaksanaan program G-Online terutama perkembangan website subdomain.

Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal terkait dengan penyediaan jaringan G-Online di Kabupaten Sumenep dengan hal ini dapat memberikan impact yang baik pada penerapannya dan juga dapat semakin tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu, dengan demikian kinerja para OPD

dapat terakomodir dengan sistematis dan efektif untuk melayani masyarakat. Dengan program ini cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat dikatakan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal, sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit Msc., M. (2002). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rohmat Taufiq, S. M. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Tangerang: Graha Ilmu.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Penelitian dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi

Sumber Jurnal

- Indrajit, Richardus Eko (2013), *Elemen Sukses Pengembangan E-Governemnet, E-Artikel Sistem dan Teknologi Informasi*, Nomor: 233. Diakses di https://www.academia.edu/14352712/Ellemen_Sukses_Pengembangan_Egovernement, 23 September 2019.

Infokom (2006), "G-OnLine Pemerintah Kabupaten Sumenep Masuk Nominasi 10 Terbaik Di Indonesia". Diakses di <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/g-on-linepemerintah-kabupaten-sumenep-masuk-nominasi-10-terbaik-di-indonesia>

Kurniawan, D. 2017. Ini Manfaat Program Smart City bagi Masyarakat. <<http://medan.tribunnews.com/2017/01/30/ini-manfaat-program-smart-citybagi-masyarakat>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018.

Master Plan Smart city Kabupaten Sumenep 2019-2018. Diakses di <http://www.sumenepkab.go.id/upload/s/documen/buku/12052018-lap-akhirbuku-2-final.pdf>

Manguluang, A. P. 2016. Persiapan Kota Makassar sebagai Smart City. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar

Prasetyono, A. P. 2016. Urgensi Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Bidang Smart City. <<http://www.dikti.go.id/urgensi-penelitian-danpengembangan-teknologi-di-bidang-smartcity/#YD7AmcHcOkChSUwX.99>>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018.